

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal pelaksanaan pembangunan terutama di Negara Dunia Ketiga yang berorientasi pertumbuhan (*growth*) telah membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Disamping berbagai prestasi yang berhasil diraih, pendekatan ini terbukti telah meningkatkan persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dan bertambahnya pengangguran berdasarkan indikator Bank Dunia. Hal ini membuktikan pula bahwa hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat sampai lapisan terbawah (*trickle-down effect*) yang melekat pada paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) ternyata tidak terwujud bahkan yang terjadi justru kesenjangan semakin melebar. Strategi ini pada prakteknya cenderung berpusat pada kota dan sektor industri padat modal sehingga seringkali melupakan pembangunan sektor pertanian dan pedesaan dan turut pula memperparah ketimpangan wilayah khususnya antara desa-kota. Investasi ekonomi (infrastruktur dan kelembagaan) mayoritas diarahkan untuk melayani daerah perkotaan yang relatif memiliki pertumbuhan cepat. Hal ini dipertegas oleh Uphoff, Esman dan Krishna (1998: 2) dengan kutipan dibawah ini:

What is most relevant here is that such as a strategy stipulates no role for rural development as a priority for government or donor resources, since rural poverty is seen as a residual phenomenon, destined to be eliminated eventually by vigorous and continued industrial growth.

(Yang paling relevan disini adalah bahwa strategi yang ditetapkan tidak menjadikan pembangunan masyarakat desa sebagai prioritas bagi pemerintah atau lembaga donor, karena kemiskinan pedesaan dilihat sebagai peristiwa sisa untuk dihapuskan secepatnya dan melanjutkan pertumbuhan industri).

Indonesia terutama pada masa orde baru sebagai salah satu negara yang mengimplementasikan strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan juga melahirkan berbagai permasalahan hingga saat ini terutama kemiskinan di daerah pedesaan. Berdasarkan data dari Badan

Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan (<http://www.bps.go.id/releases/files/kemiskinan-01sep06.pdf>. diakses tanggal 14 september 2007).

Bentuk keprihatinan lain dari strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan adalah proses pembangunan yang bersifat *top down*. Pendekatan *top-down* berarti proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan kerap kali dilakukan dari atas ke bawah. Rencana program pembangunan biasanya dibuat di tingkat pusat (atas) dan dilaksanakan oleh daerah dan desa. Masyarakat sering kali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan, dengan demikian masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Kondisi ini melahirkan beberapa persoalan antara lain adalah lunturnya semangat kerjasama, hilangnya swakarsa, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar dalam menggerakkan pembangunan, dan menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan. Kondisi seperti itu tentu saja tidak menguntungkan bagi upaya terciptanya proses pembangunan yang berdaya guna dan berkelanjutan. Pembangunan bagaimanapun ia diartikan selalu mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah maka sudah sewajarnya masyarakatlah yang dijadikan pemilik program pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar perubahan yang hendak dituju adalah perubahan yang dikehendaki dan diketahui oleh masyarakat. Perspektif inilah yang dinyatakan sebagai pembangunan berpusat rakyat, karena hanya rakyat sendiri yang bisa menentukan apa sebenarnya yang mereka anggap sebagai perbaikan dalam kualitas hidup mereka (Korten: 2001:110).

Sejalan dengan perspektif diatas pembangunan pada hakekatnya bukan hanya sebuah proses kemajuan ekonomi, akan tetapi juga sebuah proses kemajuan sosial, karena pembangunan yang hanya membawa kemajuan ekonomi tidaklah membawa kepada kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Kesadaran akan makna pembangunan ini melahirkan upaya penggabungan tujuan-tujuan ekonomi dan tujuan-tujuan sosial seperti yang terangkum dari definisi pembangunan sosial yang dikemukakan oleh Midgley (2005:37) yakni sebuah proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa diperlukan adanya pembangunan sosial yang menawarkan perspektif makro yang komprehensif yang bertitik pusat pada komunitas masyarakat, menekankan intervensi yang terencana, mengangkat pendekatan untuk tujuan kesejahteraan seluruh masyarakat, dan intinya dapat mengharmonisasikan intervensi sosial dengan usaha-usaha pembangunan ekonomi.

Pembangunan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial dilakukan dengan berbagai strategi salah satunya adalah pembangunan sosial oleh masyarakat. Strategi ini menekankan pada peran komunitas masyarakat dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendukung strategi ini percaya bahwa rakyat dan masyarakat memiliki kapasitas yang inheren untuk mengorganisir diri mereka sendiri untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka dapat terpenuhi, masalah mereka dapat dipecahkan dan terciptanya kesempatan untuk memperbaiki hidup (Midgley:166). Lebih jauh mengenai pentingnya pendekatan komunitas dalam pembangunan, menurut Rubin (1992:10) terdapat lima tujuan yang dapat dicapai dengan pendekatan komunitas, yaitu:

1. meningkatkan kualitas hidup dengan mencari penyelesaian masalah yang dihadapi
2. mengurangi ketidakadilan yang disebabkan ketidakadilan rezim yang berkuasa

3. memelihara nilai-nilai demokratisasi
4. sebagai bagian dari proses pengembangan potensi yang dimiliki individu yang memberikan kontribusi kepada masyarakat
5. meningkatkan kesadaran bermasyarakat.

Berkenaan dengan keunggulan pendekatan ini Uphoff dan Esman dalam studi yang kemudian dibukukan dengan judul "*local organization for rural Development: analysis of Asian Experience*" (1974) meneliti 16 kasus kegiatan komunitas di 16 negara Asia, Afrika dan Eropa. Penelitian dilakukan dengan membandingkan dua kelompok kasus, yaitu China, Mesir, Israel, Jepang, Korea, Srilanka, Taiwan dan Yugoslavia sebagai kelompok "yang lebih terorganisir" (*more organized group*) dan kelompok lainnya yang mereka sebut sebagai kelompok "yang kurang terorganisir" (*less organized group*) yang terdiri atas Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Filipina, Thailand, dan Turki. Hasil studi atas dua kelompok yang berbeda ini menyimpulkan bahwa:

1. adanya organisasi yang menjangkau sampai ke tingkat lokal
2. yang bertanggungjawab pada komunitas lokal, dan
3. mampu melibatkan fungsi-fungsi pembangunan perdesaan, umumnya dapat mencapai tujuan pembangunan secara lebih sukses.

Melihat berbagai pendapat diatas, dapat diketahui bahwa keberadaan anggota masyarakat yang secara bersama-sama bekerja untuk menanggulangi permasalahan, akan efektif jika keberadaan atau aktivitas komunitas tersebut dimobilisasi dalam suatu bentuk kelembagaan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rubin sendiri (1992:7) bahwa pendekatan pengembangan komunitas lokal lebih berdaya jika diorganisasikan atau dilembagakan melalui kegiatan kolektif yang dapat mengontrol pengambilan keputusan, proyek, program dan kebijakan. Untuk itu pemanfaatan lembaga lokal yang dikenal dengan *local institution* dalam kegiatan pembangunan merupakan salah satu strategi yang patut untuk diterapkan. Bila dikaitkan dengan tujuan pengembangan masyarakat sebagaimana dikemukakan Glen (dalam Adi, 2001:224-225), keberadaan anggota masyarakat yang secara bersama-sama menanggulangi

permasalahan melalui lembaga lokal memiliki tujuan mengembangkan kemandirian dan, pada dasarnya memantapkan rasa kebersamaan sebagai suatu komunitas berdasarkan basis ketetanggaan (*neighbourhood*), meskipun bukan secara eksklusif.

Penelitian ini merupakan penelitian konfirmatif dari studi-studi diatas, dimana berfokus pada kinerja organisasi lokal sebagai salah satu strategi dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Penelitian ini lebih melihat pelaksanaan tugas organisasi lokal hasil bentukan proyek dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dimana mencoba menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama dalam upaya pengembangan kelembagaan.

Sejalan dengan ini, keberadaan lembaga dan organisasi lokal yang dikembangkan masyarakat lokal sudah sepatutnya mendapat tempat dalam pembangunan terutama pembangunan pedesaan. Uphoff, Esman, dan Krishna (1998) yang juga para pemerhati pembangunan terutama di negara-negara Dunia Ketiga berkesimpulan bahwa program pembangunan memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik bila mempertimbangkan sumberdaya organisasi lokal yang sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan. Aksi kolektif membantu menciptakan ikatan di masyarakat yang diperlukan organisasi untuk melembagakan upaya pemecahan masalah bersama. Hal ini dipertegas dengan kutipan dibawah ini (1998:64):

To maintain effective popular engagement in rural development programs, systems of local organization are needed that are appropriate to the task and to the capacities of rural people.

(Untuk memelihara efektifitas di (dalam) program pembangunan masyarakat desa, sistem dari organisasi lokal diperlukan yang sesuai dengan masalah dan kapasitas orang-orang pedesaan)

Pemahaman diatas juga mendorong adanya pergeseran organisasi sosial yang sebelumnya dianggap sebagai kendala dalam pelaksanaan proyek menjadi sumberdaya dalam pembangunan dengan menyertakan organisasi sosial ini sebagai unit-unit pelaksana. Hal ini diperkuat dengan apa yang disinggung oleh Kottak (1988:435) bahwa strategi yang paling produktif

untuk melakukan perubahan adalah mendasarkan rancangan sosial inovasi pada bentuk-bentuk sosial tradisional di kawasan proyek. Dengan demikian untuk kedepannya dirasakan adanya kebutuhan untuk memperkuat dan mengembangkan organisasi-organisasi ini.

Uphoff, Esman dan Krishna (1998) kembali menekankan bahwa organisasi lokal dalam pembangunan masyarakat pedesaan bukanlah suatu usaha replikasi. Ini menunjukkan bahwa organisasi lokal yang menjadi sumberdaya berbeda, tergantung kebutuhan program dan karakteristik masyarakat lokal. Ada yang lebih tepat menggunakan organisasi lokal yang memang telah ada di masyarakat lokal tetapi ada pula yang memang dibutuhkan organisasi baru yang menjadi motor penggerak di dalam masyarakat. Dengan demikian strategi diarahkan pada pengembangan kapasitas organisasi lokal dan bagaimana organisasi dapat berjalan secara efektif yang dilandasi oleh partisipasi.

Pada buku lain, Esman dan Uphoff (1984:24) mengemukakan bahwa dalam kerangka efisiensi sumberdaya yang digunakan dalam pembangunan daerah pedesaan, penggunaan pendekatan organisasi lokal sebagai pendekatan alternatif memiliki beberapa keuntungan:

1. Menyediakan informasi yang akurat dan representatif. Melalui organisasi lokal informasi mengenai kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat lokal lebih dapat digali dan dapat memberikan umpan balik kepada pemerintah dalam upaya penyediaan layanan kepada masyarakat.
2. Dengan berbagi tanggungjawab dengan pemerintah untuk membantu efisiensi program, organisasi lokal mendorong kemampuan adaptasi masyarakat terhadap program-program pemerintah
3. Meningkatkan efisiensi program, dengan berkembangnya komunikasi kelompok
4. Melalui organisasi lokal dapat memobilisasi sumberdaya yang ada di masyarakat

5. Melalui organisasi lokal, pengetahuan masyarakat lokal yang ada dapat dimanfaatkan bagi keberhasilan program pembangunan.
6. Pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas layanan umum dapat dilakukan dengan baik dengan keterlibatan organisasi lokal.
7. Dapat dikembangkan kerjasama dan partisipasi diantara masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah demi perubahan sosial, ekonomi dan teknologi.

Dengan demikian semakin disadari bahwa peran organisasi lokal sebagai sarana pembangunan masyarakat akan efektif jika organisasi lokal ini dikembangkan sendiri oleh anggotanya. Salah satu perwujudan strategi pembangunan yang diuraikan diatas adalah proyek *The Second Water and Sanitation for Low Income Communities* (WSLIC-2) yang mencoba mengangkat kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan menciptakan lembaga lokal melalui pembentukan organisasi lokal. Pembentukan organisasi lokal ini mencoba menempatkan masyarakat pedesaan sebagai pelaku utama dalam setiap tahapan proyek baik tahap perencanaan, tahap implementasi maupun tahap pasca proyek melalui partisipasi aktif dari masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Dwipayana dan Eko (2003:112) bahwa organisasi merupakan basis partisipasi masyarakat desa.

Proyek WSLIC-2 ini merupakan upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dalam bidang kesehatan melalui program pembangunan di bidang pengadaan sarana air bersih, sanitasi, perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pelayanan kesehatan dasar dengan tujuan meningkatkan kualitas produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Upaya memenuhi kebutuhan dasar ini dipandang sebagai prasyarat kemandirian masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Ismani (1991:45) dalam kutipan dibawah ini:

Oleh karena tanpa terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, mustahil pembangunan dalam berbagai bidang bisa terlaksana. Mereka hanya mampu menghadapi tantangan kalau kebutuhan dasar mereka terjamin. Demikian pula tuntutan dan harapan mereka meningkat apabila timbul kesadaran dan semangat mengembangkan dirinya. Pembangunan masyarakat desa yang

pada hakekatnya merupakan usaha perbaikan taraf hidup masyarakat desa akan berhasil baik kalau ada motivasi mereka untuk mengembangkan dirinya. Dengan demikian akan timbul peran serta aktif dalam pembangunan yang hasilnya akan mereka nikmati.

Memang pada kenyataannya proses pembangunan nasional kita sampai pada akhir-akhir ini nampaknya terlalu bertumpu pada mekanisme distribusi dan alokasi yang sentralistis yang mencoba memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dan strategi ini pada akhirnya akan kurang mampu mengembangkan masyarakat secara optimal. Malahan besar kemungkinan menciptakan ketergantungan yang kontraproduktif dengan tujuan pembangunan.

Proyek WSLIC-2 merupakan upaya pemerintah dan Bank Dunia sebagai Lembaga Donor untuk mensejahterakan rakyat dalam bidang kesehatan. Proyek dilaksanakan di 7 (tujuh) propinsi dan meliputi 2000 desa yang menjadi target sasaran dengan jangka waktu 6 (enam) tahun mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Sedangkan khusus untuk propinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan baru dimulai tahun 2004 dan akan diperkirakan selesai tahun 2008. Gambaran lokasi proyek disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Lokasi Proyek WSLIC-2

No	PROPINSI	KABUPATEN
1	Sumatera Barat	Pasaman, Pesisir Selatan, Sawahlunto-Sijunjung dan Solok
2	Sumatera Selatan	Lahat, Muara Enim dan Musi Banyuasin
3	Bangka Belitung	Belitung
4	Jawa Timur	Blitar, Malang, Bojonegoro, Mojokerto, Bondowoso, Pamekasan, Jember, Ponorogo, Kediri, Probolinggo, Lamongan, Sampang, Lumajang, dan Sumenep
5	Nusa Tenggara Barat	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa
6	Jawa Barat	Bogor, Ciamis dan Cirebon

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Proyek WSLIC-2, CPMU, 2002

Proyek WSLIC-2 pada dasarnya merupakan replikasi dari proyek *The Water Supply and Sanitation for Low Income Communities* (WSSLIC) yang dilaksanakan dari tahun 1993 sampai dengan 1999. Misi dari proyek ini adalah mengurangi kemiskinan dengan membantu orang miskin memperoleh akses yang berkelanjutan terhadap sarana air bersih dan sanitasi. Pelaksanaan proyek WSSLIC dilakukan di enam propinsi yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam *WSLIC-2 Project Appraisal Document* disebutkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan proyek WSSLIC antara lain rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa lokasi proyek, proses pengadaan, administrasi proyek, dan pengucuran dana proyek.

Sasaran proyek WSLIC-2 ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan yang kurang atau tidak mendapat akses air bersih dan sanitasi dasar dengan beberapa kriteria, yaitu desa dengan indeks kemiskinan yang tinggi, insiden/prevalensi penyakit yang ditularkan melalui air (*water-borne diseases*) tinggi, dan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar rendah. Sedangkan tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan status kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah di pedesaan melalui tujuan khusus antara lain:

1. Perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
3. Penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat
4. Kestinambungan pembangunan masyarakat secara partisipatif

Gambaran proyek diatas terutama tujuan yang ingin dicapai dalam proyek ini mensyaratkan adanya kestinambungan melalui partisipasi masyarakat. Kestinambungan hasil proyek dalam proyek WSLIC-2 diartikan sebagai suatu kondisi dimana sarana air bersih dan sanitasi yang telah

dibangun dapat tetap berfungsi dan memenuhi tingkat kepuasan penggunaanya secara terus menerus (CPMU WSLIC-2 2004). Artinya bahwa kesinambungan menjamin adanya kelanjutan manfaat yang diperoleh dari sarana yang telah dibangun. Sudah menjadi suatu kepentingan bersama bahwa pembangunan harus mencerminkan kesinambungan. Pembangunan yang berkesinambungan merupakan pembangunan yang dapat berlangsung lama dengan memastikan bahwa kepentingan generasi yang akan datang terpenuhi (World Bank dalam Midgley. 2005:199). Air bersih di Indonesia diprediksikan dalam lima tahun mendatang akan langka, akibat minimnya kepedulian masyarakat terhadap air bersih dan juga kerusakan ekosistem lingkungan (Kalimantan Post, 25 Januari 2003). Pembangunan berkesinambungan menciptakan sebuah proses yang memastikan bahwa sumber alam dapat terjaga dan generasi yang akan datang akan terus memiliki sumber yang mereka butuhkan. Pembangunan berkesinambungan menunjukkan bagaimana menggunakan sumber yang ada dan menjaga bagaimana generasi yang akan datang memiliki akses pada sumber ini nantinya.

Kesinambungan dalam Proyek WSLIC-2 dapat diwujudkan salah satunya yaitu dengan terbentuknya Badan Pengelola Sarana (BPS) sebagai organisasi lokal dalam masyarakat. Dimana hal ini sesuai dengan yang diuraikan Mukherjee dalam Alam (2006) bahwa untuk menjaga agar sarana tetap beroperasi dan bermanfaat secara luas, masyarakat membutuhkan kelembagaan. Di samping itu lembaga yang ada sebaiknya memiliki karakteristik budaya setempat, mempunyai aturan yang dipahami dan disepakati bersama, memiliki kemampuan manajemen serta akuntabilitas. Dengan kata lain proyek WSLIC-2 merupakan proyek yang mengedepankan keorganisasian masyarakat melalui Badan Pengelola Sarana yang bertanggungjawab menciptakan kesinambungan proyek yang dibentuk dan dipilih kepengurusanya secara demokratis sesuai aspirasi masyarakat sendiri dengan tujuan

- Adanya kesinambungan pelayanan, peningkatan cakupan, pengembangan sarana air bersih dan sanitasi

- Terlaksananya kegiatan kesehatan lingkungan di masyarakat
- Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan produktivitas masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas bahwa BPS terbentuk di masyarakat yang memanfaatkan hasil implementasi proyek, maka penelitian ini memfokuskan pada upaya dari BPS dalam mewujudkan kesinambungan pasca proyek. Penelitian ini dianggap penting karena dalam meningkatkan kapasitas perseorangan maupun institusi peran kelembagaan baik dalam arti pranata maupun sebagai institusi dalam masyarakat tersebut sangat penting dalam mengoptimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Selanjutnya upaya organisasi lokal dalam pengelolaan sarana menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui pengembangan kreatifitas dan inisiatif masyarakat itu sendiri untuk meraih peluang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Menurut Sumarjo dan Saharudin (2003), apabila suatu kebutuhan pembangunan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat maka akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) akan benar-benar menjadi kekuatan internal dalam pembangunan masyarakat.

Penelitian mengenai organisasi lokal baik hasil inisiatif dari masyarakat maupun hasil bentukan proyek telah banyak dilakukan seperti yang nampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Daftar Penelitian Mengenai Organisasi Lokal

No	Peneliti/Tahun	Judul/Lokasi	Fokus	Kesimpulan
1	Erna Noviyanti (2005)	Pengorganisasian Kelompok Masyarakat Pemanfaat dan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2003 (Studi Kasus Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)	Melihat bagaimana proses terbentuk dan berfungsinya unit organisasi sosial yang berbentuk kelompok dan organisasi lokal yang berbentuk koperasi	Pengorganisasiannya menggunakan kelompok dan organisasi lokal yang sudah ada yang dibentuk pada Program PEMP 2001 sehingga program ini lebih kearah membenahan program sebelumnya. Kelompok yang dibentuk berdasarkan eksistensi sebelumnya lebih berhasil dibanding yang hanya dibentuk karena program. Sedangkan LEPP-M3 yang berbentuk koperasi dengan antusiasme masyarakat yang tinggi memerlukan pengembangan sumberdaya yang ada.
2	Suharto (2006)	Pengorganisasian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program Adopsi Desa Miskin (ADEM) Tahun 2003 di Desa Sukasari Kecamatan Rajek Kabupaten Tangerang	Melihat bagaimana proses pembentukan KUBE dan peranannya dalam pemberdayaan fakir miskin melalui program ADEM	Proses pembentukan KUBE dalam program ADEM masih terkesan "top down" sehingga hubungan antara masyarakat dan pendamping bersifat "patron klien", masyarakat belum diarahkan sebagai pelaku utama program. Peranan dan fungsi yang dijalankan oleh KUBE Bunga Sari belum maksimal khususnya dalam pengelolaan sumberdaya
3	Amri Sujana (2005)	Kinerja Organisasi Lokal dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Prasarana Pedesaan (Studi Kasus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Al-Amal, OMS Kelompok Tani Mera Utama, dan OMS Al-Lathifah di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah	Melihat bagaimana kinerja organisasi lokal dalam pelaksanaan program dan faktor penghambat kinerja organisasi lokal.	Dari ketiga OMS yang di teliti, OMS Al-Amal dan OMS Kelompok Tani Mera Utama yang lebih menggunakan pendekatan partisipatif telah mampu menggerakkan warga masyarakat Sedangkan OMS Al-Lhatifah lebih menggunakan pendekatan mobilisasi sehingga cenderung kurang mampu untuk menggerakkan warga masyarakat Dari sisi internal terdapat hambatan dalam manajemen sumberdaya sedangkan dari sisi eksternal adalah penggunaan sistem teknologi yang masih tradisional.
4	Chairul Baihaqi (2005)	Upaya Organisasi Lokal Berbasis Sumberdaya Alam dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi Anggota (Studi Kasus Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor	1. Melihat bagaimana upaya Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru mengefektifkan sumberdaya untuk meningkatkan usaha ekonomi anggota serta faktor pendukung dan kendala yang dihadapi	Kelompok Usaha Ikan Hias mempunyai upaya yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi anggota kelompok dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada yaitu Situ Ciseeng yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk pembudidayaan ikan hias. Faktor pendukung adanya kepercayaan dan konsensus di antara anggota, sedangkan kendalanya adalah adanya ketidakefektifan dalam organisasi.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penelitian mengenai organisasi lokal telah beberapa kali dilakukan. Baihaqi (2005) memfokuskan penelitiannya pada Kelompok Usaha Ikan Hias sebagai organisasi lokal melihat bahwa organisasi lokal ini melakukan upaya yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi anggotanya karena organisasi lokal ini dibentuk berdasarkan inisiatif dari masyarakat sendiri, sedangkan Noviyanti (2005) membandingkan empat Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dari program PEMP 2003 dan melihat bahwa tidak berfungsinya secara maksimal KMP tersebut karena adanya intervensi yang kuat dari pemerintah lokal setempat tanpa melihat aspek kontekstual masyarakat baik dari dukungan keragaman sumberdaya ekonomi local, karakter-karakter SDM setempat dan juga kearifan-kearifan lokal yang sangat menentukan. Kemudian Suharto (2006) melihat bahwa Proses pembentukan KUBE dalam program ADEM masih terkesan "*top down*" sehingga hubungan antara masyarakat dan pendamping bersifat "patron klien". Pada bagian lain Sujana (2005) yang memfokuskan pada kinerja organisasi lokal yang dilibatkan dalam program Pengembangan Prasarana Pedesaan melihat bahwa organisasi lokal belum sepenuhnya bisa menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa organisasi lokal hasil bentukan program pemerintah yang dipercaya dapat menjadi motor penggerak dalam masyarakat dalam proses pemberdayaan masih banyak menghadapi kendala. Berdasarkan hal tersebut maka penulis beranggapan bahwa dalam penulisan tesis ini fokus penelitian yang melihat keberadaan organisasi lokal dalam sebuah program atau proyek masih sangat menarik untuk diteliti mengingat juga bahwa penelitian mengenai upaya organisasi lokal hasil bentukan proyek untuk menjadi sebuah lembaga dimasyarakat (pelembagaan) melalui konsep kesinambungan proyek WSLIC-2 belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian mengenai proyek WSLIC-2 yang pernah dilakukan antara lain tergambar dari tabel berikut ini:

Tabel 3

Daftar Penelitian Mengenai Proyek WSLIC-2

No	Peneliti/Tahun	Judul/Lokasi	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mohamad Ari Alam (2006)	Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kestinambungan dan Efektifitas Proyek (Studi Pada Proyek Second Water And Sanitation For Low Income Communities (WSLIC-2) di Desa Ngebruk, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)	Melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kestinambungan dan efektifitas proyek WSLIC-2 dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi tersebut	Secara umum masyarakat telah berpartisipasi dalam mewujudkan kestinambungan dan efektifitas proyek, dibuktikan dengan adanya pemanfaatan dan pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kestinambungan dan efektifitas proyek adalah kebijakan yang berkaitan dengan proyek WSLIC-2 dan pelaksana proyek. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sosial budaya masyarakat yang terlihat dari stereotipe peran perempuan yang tidak seimbang dengan laki-laki
2	Atjih Djuarsih (2006)	Evaluasi Hasil Proyek WSLIC-2 (Water and Sanitation for Low Income Communities) Terhadap Insiden Diare di Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Tahun 2004-2006	Melihat perbedaaan presentase cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, insiden diare, dan melihat perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebelum dan sesudah proyek WSLIC-2	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya proyek WSLIC-2 terjadi peningkatan presentase cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, dan insiden diare, tetapi tidak signifikan dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum terwujud.

Berdasarkan data diatas penelitian mengenai proyek WSLIC-2 pernah dilakukan diantaranya adalah Atjih Djuarsih (2006) dan Mohamad Ari Alam (2006). Atjih Djuarsih dalam penelitiannya lebih melihat dari faktor kesehatan lingkungan dengan mengevaluasi hasil proyek WSLIC-2 terhadap insiden diare di salah satu lokasi proyek WSLIC-2 dan berkesimpulan bahwa proyek WSLIC-2 sudah dapat menurunkan insiden diare walaupun belum maksimal. Sedangkan Mohamad Air Alam dalam penelitiannya menggambarkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesinambungan dan efektivitas proyek pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca proyek, berkesimpulan bahwa secara umum masyarakat telah berpartisipasi dalam mewujudkan kesinambungan dan efektivitas proyek, dibuktikan dengan adanya pemanfaatan dan pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi.

Dengan melihat fokus penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melihat lebih jauh pelaksanaan tugas-tugas organisasi lokal hasil bentukan proyek WSLIC-2 yaitu BPS dalam mewujudkan kesinambungan pasca proyek sebagai bentuk pelebagaan organisasi lokal ditengah-tengah masyarakat. Dipilihnya Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat sebagai lokasi penelitian karena *Project Management Unit* (PMU) Kabupaten Bogor sebagai pihak yang secara penuh menangani pelaksanaan proyek WSLIC-2 di tingkat kabupaten telah sejak awal menerapkan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*) dimana PMU Kabupaten Bogor tidak terpaku pada pagu perencanaan yang telah ditetapkan dari Bank Dunia dalam hal perencanaan pendanaan yaitu Rp 250.000.000. untuk setiap desa sasaran akan tetapi lebih kepada melihat hasil identifikasi kebutuhan dilapangan dengan melakukan *Prior Review* yakni meminta peninjauan kembali terhadap kebutuhan dan permasalahan masyarakat dalam mengimplementasikan proyek WSLIC-2 kepada Bank Dunia. Dengan demikian sarana yang dibangun melalui proyek tersebut memang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan hal ini tentu saja akan menjadi daya dorong untuk mengoptimalkan upaya kesinambungan selanjutnya.

Adapun pemilihan desa lokasi penelitian adalah desa yang merupakan sasaran proyek WSLIC-2 pertama di Kabupaten Bogor yakni pada Tahun Anggaran 2005 sehingga akan lebih banyak informasi mengenai pelaksanaan tugas-tugas dari Badan Pengelola Sarana sebagai organisasi lokal yang ada di desa tersebut dalam mewujudkan kesinambungan pasca proyek serta upayanya melembagakan aturan dan tata cara organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan Tabel 5, pemilihan desa lokasi penelitian dilihat dengan menggunakan tiga indikator upaya kesinambungan awal yang dilakukan oleh BPS yakni: *pertama* penggunaan *Watermeter* baik yang di Keran Umum (KU) maupun untuk Sambungan Rumah (SR). Alat ini sebagai langkah awal dalam mewujudkan perubahan pola konsumsi yang bertanggungjawab terhadap air bersih dan alat ini pula yang menjamin adanya keadilan dalam hal iuran pemakaian air. *Kedua*, jumlah sambungan sarana air bersih yang masuk ke rumah penduduk, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan air bersih. *Ketiga*, adanya alokasi dana penyusutan untuk 15 tahun mendatang yang dilakukan oleh BPS untuk menjamin kesinambungan pelayanan air bersih terhadap masyarakat setempat. Dengan tiga indikator yang diberikan kepada semua desa sasaran pertama proyek WSLIC-2 di Kabupaten Bogor maka kemudian terpilihlah desa Situdaun yang memenuhi ketiga indikator tersebut.

Tabel 4: Daftar Desa Sasaran Proyek WSLIC-2 Tahun 2005 Kabupaten Bogor, Jawa Barat

No	Nama Desa	Watermeter		Jumlah Sumbangan Rumah	Dana Penyusutan
		Keran Umum (KU)	Sumbangan Rumah (SR)		
1	Cibedug	Tidak ada	Tidak ada	0	Tidak ada
2	Cileungsi	Tidak ada	Tidak ada	62	Tidak ada
3	Bojong Murni	Tidak ada	Tidak ada	30	Tidak ada
4	Sukamanah	Tidak ada	Tidak ada	302	Tidak ada
5	Sukagalih	Tidak ada	Ada	48	Tidak ada
6	Muara Jaya	Tidak ada	Tidak ada	23	Tidak ada
7	Tangkil	Tidak ada	Tidak ada	193	Tidak ada
8	Sibanteng	Tidak ada	Tidak ada	21	Tidak ada
9	Petir	Tidak ada	Tidak ada	132	Tidak ada
10	Cimanggu I	Tidak ada	Tidak ada	34	Tidak ada
11	Cisalada	Tidak ada	Tidak ada	112	Tidak ada
12	Situdaun	Ada	Ada	118	Ada

Sumber: BPS-BPS desa sasaran Proyek WSLIC-2 Tahun 2005 Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengambil judul: **"Pelaksanaan Tugas Organisasi Lokal dalam Mewujudkan Kestinambungan Pasca Proyek (Studi Kasus pada Badan Pengelola Sarana (BPS) Situdaun pada Proyek *Second Water and Sanitation for Low Income Communities* (WSLIC-2) di Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)"**.

B. Pokok Permasalahan

Untuk mencapai tujuan proyek WSLIC-2 yaitu peningkatan derajat kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah di pedesaan, adalah melalui pembangunan sarana air bersih, sanitasi dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Dengan mengacu pada prinsip dasar dari proyek WSLIC-2 yaitu pemberdayaann maka keterlibatan dan peran serta masyarakat sangat besar dalam upaya memberdayakan dirinya sendiri. Dengan demikian masyarakat perlu diorganisasikan karena organisasi adalah salah satu sumber daya atau kekuatan yang penting agar terjadi kesinambungan pasca proyek WSLIC-2.

Dalam proyek WSLIC-2 Badan Pengelola Sarana (BPS) yang dibentuk menjelang berakhirnya proyek memiliki fungsi yang sangat vital dalam mewujudkan kesinambungan proyek terutama pasca proyek, karena organisasi ini merupakan suatu organisasi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak masa pasca proyek agar pembangunan sarana dapat terus memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah sejauhmana pelaksanaan tugas-tugas BPS dari Proyek WSLIC-2 dapat mewujudkan kesinambungan pasca proyek di suatu desa.

BPS yang akan diteliti adalah BPS Situdaun di Desa Situdaun Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. BPS Situdaun merupakan salah satu dari 12 BPS yang terbentuk pada tahap pertama pelaksanaan proyek yakni tahun 2005. BPS Situdaun dipilih karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan BPS lainnya. Mereka telah memperhatikan aspek kesinambungan baik kesinambungan sumberdaya air maupun kesinambungan sarannya. Kesinambungan sumberdaya air diwujudkan melalui penggunaan alat *Watermeter* yang dapat mengukur banyaknya air yang dikonsumsi oleh masyarakat dan berdampak langsung pada iuran yang mereka bayarkan. Sedangkan kesinambungan sarana mereka coba wujudkan melalui pengalokasian dana yang berasal dari iuran masyarakat untuk mempersiapkan penyusutan yang diperkirakan akan terjadi pada 15 tahun mendatang. Fenomena ini sangat menarik bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian, maka dirumuskanlah pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Badan Pengelola Sarana (BPS) Situdaun dalam mewujudkan kesinambungan pasca proyek WSLIC-2 di Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas BPS Situdaun dalam mewujudkan kesinambungan pasca proyek WSLIC-2 di Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh pada eksistensi organisasi lokal hasil bentukan proyek dalam mendorong kemandirian masyarakat dengan melihat bagaimana pelaksanaan tugas-tugas organisasi lokal hasil bentukan proyek dapat mewujudkan kesinambungan proyek. Berdasarkan rumusan latar belakang dan permasalahan diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Sarana Situdaun sebagai organisasi lokal hasil bentukan proyek WSLIC-2 dalam mewujudkan kesinambungan pasca proyek di Desa Situdaun Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Pengelola Sarana Situdaun dalam mewujudkan kesinambungan pasca proyek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial umumnya, khususnya ilmu kesejahteraan sosial dalam hal pengembangan lembaga lokal ditengah-tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dalam hal ini terutama Departemen Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program pembangunan desa terutama dengan pendekatan pengembangan kelembagaan lokal dimasyarakat. Tidak lupa pula penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak donor proyek dalam rangka upaya perbaikan perencanaan dan pelaksanaan proyek.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian mengenai strategi dan pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Keberadaannya dalam suatu penelitian sangat penting karena didalamnya mencakup hal-hal seperti informasi apa yang akan diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian beserta cara memperolehnya. Selain itu juga dijelaskan siapa yang menjadi sumber informasi dan cara mengolah data yang sudah diperoleh sehingga dihasilkan suatu deskripsi yang memiliki aspek ilmiah.

E.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran secara menyeluruh dan valid mengenai berbagai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh BPS Situdaun sebagai organisasi lokal hasil bentukan proyek WSLIC-2. Dalam hal ini pendekatan yang dianggap lebih relevan dengan tujuan penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini mencoba menemukan pemahaman akan interpretasi atau makna terhadap suatu gejala sosial.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) menyatakan bahwa:

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh), sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Selanjutnya Sugiyono (2005:9) memberikan karakteristik pendekatan kualitatif antara lain:

- a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk
- d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif

- e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa beberapa karakteristik diatas sesuai dengan gambaran subjek penelitian yang akan diteliti. Melalui pendekatan ini diharapkan penulis mampu mendeskripsikan secara detail dan apa adanya mengenai proses dan sifat realitas yang dibangun secara sosial yang terdapat di lapangan yakni berbagai pelaksanaan tugas yang dilakukan BPS untuk mewujudkan kesinambungan pasca proyek. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai konsep dan teori yang dijadikan acuan ataupun pedoman dalam mengungkap dan menganalisa fenomena-fenomena dilapangan.

E.2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai pelaksanaan tugas-tugas dari organisasi lokal hasil bentukan Proyek WSLIC-2 dalam mewujudkan kesinambungan proyek. Selain itu juga menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Menurut Whitney dalam Nazir (2003:54-55) penelitian deskriptif merupakan:

Suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan menggambarkan masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

E.3 Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong: 2002). Dengan demikian informan dalam penelitian ini merupakan orang yang dianggap memiliki keterlibatan ataupun pengetahuan tentang permasalahan yang hendak diteliti. Adapun teknik pemilihan informan dalam penelitian ini

adalah teknik *purposive sampling* yang lebih menekankan pada tujuan penelitian dari pada keterwakilan dari populasi. Mengenai teknik ini Alston dan Bowles (1998:92) berpendapat bahwa teknik sampling ini memperbolehkan kita untuk memilih sampel sesuai tujuan penelitian. Kita mungkin telah mengetahui sebelumnya kelompok mana saja yang akan berguna untuk penelitian kita atau kita pilih subyek-subyek tersebut yang kita anggap sebagai contoh yang sesuai dengan isu yang kita akan pelajari.

Berdasarkan pertimbangan diatas, penulis beranggapan bahwa pihak-pihak yang dapat dijadikan informan dalam penelitian ini adalah siapa-siapa yang mengetahui dan berhubungan langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas dari organisasi lokal hasil bentukan proyek WSLIC-2. Pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Semua Pengurus Badan Pengelola Sarana Situdaun
Penetapan semua pengurus BPS Situdaun sebagai informan dalam penelitian ini karena diharapkan akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh berbagai pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan BPS Situdaun dalam mewujudkan kesinambungan pasca proyek. Pengurus yang dijadikan informan antara lain Ketua BPS Situdaun, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Bidang Teknik, Bidang Pemberdayaan maupun Bidang Kesehatan.
- b. Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini karena tokoh masyarakat di Desa Situdaun sejak awal sudah dilibatkan dalam proyek WSLIC-2 salah satunya melalui beberapa Rembug Desa yang dilaksanakan sebagai suatu tahapan dari penerimaan proyek. Mereka dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap proyek tersebut sehingga tokoh masyarakat dapat memberikan informasi pembanding mengenai berbagai pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan BPS Situdaun dalam mewujudkan kesinambungan pasca proyek. Tokoh masyarakat yang dijadikan informan antara lain Kepala Desa

Situdaun, Ketua dan Anggota Badan Perwakilan Desa serta Tokoh yang berkonflik dengan BPS Situdaun.

c. Masyarakat

Informan masyarakat dalam hal ini lebih kepada masyarakat pengguna sarana Air bersih dan sanitasi yang dibangun melalui proyek WSLIC-2, karena mereka yang dapat merasakan berbagai dampak dari pelaksanaan tugas-tugas BPS dalam mewujudkan kesinambungan pasca proyek. Selain itu masyarakat merupakan elemen terpenting yang berpengaruh terhadap eksistensi BPS itu sendiri. Masyarakat yang ditunjuk sebagai informan sebanyak 16 orang dan dari 16 orang tersebut peneliti merasa sudah cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 16 orang informan dari masyarakat ini berasal dari empat Rukun Warga (RW) di Desa Situdaun. Setiap RW diwakili oleh empat orang informan, dua orang dipilih dari wilayah yang iurannya kurang lancar dan dua orang lagi dipilih dari wilayah yang iurannya lancar.

d. Tim Fasilitator Masyarakat (TFM)

Penetapan TFM menjadi informan karena peneliti menghendaki memperoleh informasi mengenai harapan dari pemegang proyek WSLIC-2 terhadap BPS sebagai organisasi lokal yang bertanggungjawab pada pengelolaan dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun. Implementasi Proyek WSLIC-2 di setiap desa sasaran didampingi oleh TFM yang berjumlah tiga orang antara lain Fasilitator Kesehatan, Pemberdayaan dan Teknik. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Fasilitator Pemberdayaan yang walaupun sudah memasuki masa pasca proyek masih melakukan pembinaan terhadap BPS Situdaun..

Adapun penetapan informan berdasarkan informasi yang ingin diperoleh selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 6 Penetapan Informan Berdasarkan Informasi yang Ingin Diperoleh

No	Informasi yang ingin diperoleh	Informan	Jumlah
1	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang bagaimana pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelola Sarana Situdaun sebagai organisasi lokal proyek WSLIC-2 di Desa Situdaun dalam mewujudkan kesinambungan proyek. • Informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelola Sarana Situdaun dalam mewujudkan kesinambungan pasca proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua pengurus organisasi lokal proyek WSLIC-2 yakni Badan Pengelola Sarana Desa Situdaun 	6 Orang
2	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang pengetahuan atau keterlibatan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan tugas BPS Situdaun dalam mewujudkan kesinambungan pasca proyek • Informasi tentang bagaimana pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelola Sarana Situdaun sebagai organisasi lokal proyek WSLIC-2 di Desa Situdaun dalam mewujudkan kesinambungan proyek. • Informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tokoh Masyarakat ▪ Masyarakat pengguna sarana air bersih dan sanitasi 	4 Orang 16 Orang

	pelaksanaan tugas-tugas BPS Situdaun dalam mewujudkan kesinambungan pasca proyek.		
3	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang kebijakan proyek mengenai BPS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFM 	1 Orang

E.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada organisasi lokal hasil bentukan proyek WSLIC-2 yakni BPS Situdaun di Desa Situdaun Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dipilihnya BPS Situdaun karena BPS Situdaun merupakan salah satu dari 12 BPS yang merupakan organisasi lokal hasil bentukan proyek WSLIC-2 tahapan pertama di Kabupaten Bogor. Selain itu dari 12 BPS tersebut BPS Situdaun memiliki beberapa kelebihan dalam upaya mewujudkan kesinambungan pasca proyek. Mereka mengupayakan ketertiban dalam penggunaan sarana air bersih dengan menyediakan *Watermeter* baik di Sambungan Rumah (SR) maupun di Keran Umum (KU). Selanjutnya BPS Situdaun di bandingkan dengan 12 BPS yang ada telah mampu menyisihkan dana untuk mempersiapkan penyusutan pada 15 tahun mendatang guna menjamin adanya kesinambungan pelayanan air bersih bagi masyarakat setempat.

b. Waktu Penelitian

Penelitian diawali dengan penyusunan proposal penelitian yang diikuti dengan seminar proposal yaitu dari bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Januari 2008. Waktu pengumpulan data pada bulan Februari sedangkan penulisan keseluruhan hasil lapangan dari bulan Maret hingga bulan Mei 2008.

E.5. Teknik Pengumpulan Data

Data dapat dipandang sebagai unsur terpenting dalam penelitian, karena melalui data kita dapat mengetahui jawaban dari penelitian setelah proses analisa dan interpretasi. Data dalam penelitian dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dianggap relevan dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi Literatur / Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan upaya pencarian data dengan mempelajari berbagai bahan bacaan atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder melalui sumber berupa buku, tesis, surat kabar dan sebagainya baik yang tersimpan di perpustakaan maupun sumber lainnya. Termasuk pula data yang dikumpulkan dari Sekretariat Badan Pengelola Sarana Situdaun dan Sekretariat Project Management Unit (PMU) proyek WSLIC-2 serta Kantor Desa.

b. Wawancara Mendalam

Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Wawancara oleh Nazir (2003:193-194) diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dan melalui teknik ini diharapkan tergalilah berbagai informasi yang berkenaan dengan pandangan, pengetahuan dan sikap dari informan mengenai permasalahan penelitian yakni sejauhmana upaya dari BPS Situdaun dalam mewujudkan kesinambungan proyek seperti bagaimana mereka merumuskan perencanaan dan penentuan tujuan, manajemen konflik,

memanajemen sumberdaya dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi (*functional variabel*) dari organisasi lokal tersebut.

c. Foto

Teknik pengumpulan data melalui foto bertujuan untuk menggambarkan berbagai subjek penelitian secara real di lapangan. Pengambilan foto yang dilakukan antara lain foto sarana air bersih baik Keran Umum maupun Reservoar dan pengurus BPS Situdaun.

E.6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian terdiri dari hasil wawancara, catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan dan sebagainya. Analisa Data menurut Moleong (2002:280) adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Langkah yang dilakukan adalah:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini akan membantu dalam menentukan data yang diperlukan dan bagaimana serta siapa yang akan memberikan informasi selanjutnya, metode apa yang akan digunakan untuk menganalisis yang pada akhirnya membawa kepada kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah-milah seluruh data dan informasi yang diperoleh, memisahkan data yang diperlukan dan yang tidak serta merangkum berbagai data ke dalam sebuah informasi yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Termasuk dalam hal ini adalah mempertegas informasi yang belum jelas dengan melakukan cek ulang kepada pihak lain atau menanyakan kembali kepada informan yang bersangkutan sehingga diperoleh data yang kuat. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, segala sesuatu yang sudah

ditulis dalam catatan lapangan, dokumen resmi dan sebagainya. Pada tahap ini data diberikan kode, disimpulkan dan dikategorikan menurut aspek-aspek penting dari setiap isu yang telah diteliti (Alston dan Bowles:1998:195).

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan alur penting dari kegiatan analisis. Peneliti dalam hal ini membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun secara deskriptif yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan.

c. Interpretasi Data

Tahap ini meliputi proses mengidentifikasi pola-pola, kecenderungan, dan penjelasan yang akan membawa kepada kesimpulan yang telah teruji melalui data yang benar-benar lengkap dan tidak ada informasi atau pengertian yang terlewatkan (Alston dan Bowles, 1998:195)

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- Bab I sebagai pendahuluan penelitian mencakup latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis. Selanjutnya adalah metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II berisikan tinjauan pustaka dimana dikemukakan berbagai teori dan konsep serta penjelasan yang diperlukan dalam penelitian antara lain mengenai pengertian organisasi, perbedaan organisasi dengan lembaga dan kelembagaan, pengembangan kelembagaan, pengertian lokal, organisasi lokal dan kelembagaan lokal, penggunaan organisasi

lokal dalam proyek pembangunan, konsep kesinambungan proyek, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan dari organisasi lokal dalam upaya pengorganisasian masyarakat. Selanjutnya adalah metode penelitian dan sistematika penulisan

- Bab III merupakan gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini memaparkan gambaran umum desa Situ Daun guna menjelaskan kondisi geografis dan sosio-ekonomi masyarakat desa Situ Daun. Selanjutnya dipaparkan pula profil Badan Pengelola Sarana Sitidaun yang akan diteliti, dan berbagai hal yang mendukung hasil penelitian. Gambaran ini diperlukan untuk membantu dilaksanakannya analisa data
- Bab IV adalah temuan lapangan yang berisi fakta, informasi dari pengamatan lapangan, wawancara lengkap dengan kutipan verbatim dari informan yang dianggap perlu untuk disajikan, serta kajian terhadap data, dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian
- Bab V berisikan analisa terhadap berbagai temuan penelitian yang diperoleh dari studi lapangan dan dihubungkan dengan konsep-konsep yang menjadi pijakan penelitian.
- Bab VI merupakan kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan rangkuman hasil penelitian dan pemberian beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang dihadapi.